

## ABSTRAK

Penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik. Pemerintah dapat bekerjasama dengan swasta untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat dengan membentuk suatu kontrak pemerintah. Pada prinsipnya kontrak tidak boleh merugikan kepentingan umum, serta mengingat dalam kontrak pemerintah tersebut mengandung unsur hukum publik.

Dalam penyediaan energi listrik juga dibutuhkan adanya konservasi agar penyediaan listrik dapat dikelola secara efisien dalam rangka manajemen energi. Saat ini pemerintah belum memiliki aturan hukum yang mendorong berkembangnya perusahaan jasa pelayanan energi (ESCO: *energy service company*) dalam rangka konservasi energi. Untuk selanjutnya pemerintah diharapkan lebih serius lagi membentuk peraturan untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

**Kata kunci: Kepentingan Umum, Kontrak, Ketenagalistrikan, Penyediaan Tenaga Listrik.**

## ABSTRACT

The supply of electricity to the public interest is done by government in order to meet the electricity needs. Government can cooperate with private sector to help fulfill increasing the electricity demand by forming a government contract. In principle, the contract should not be harm the public interest, as well as the government contracts containing elements of public law.

In addition to supplying energy, also requires energy conservation in order electricity supply can be managed efficiently to implement energy management. Currently the government does not have the legal rules that encourage the development of ESCO (energy services company) in order to conserve energy. For the future, the government is expected to be more serious in establish regulations to implement the electricity supply to the public interest.

***Keywords: Public Interest, Contract, Electrification, Electricity Supply.***

